

Penuh dan Sesak, Pasar Kordon Bandung Diwacanakan Relokasi

BANDUNG (IM) - DPRD Kota Bandung mewacanakan agar Pasar Kordon direlokasi ke tempat yang lebih memadai. Keberadaan pasar tersebut, turut berkontribusi terhadap kemacetan di sekitar Jalan Kordon dan Civastra.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Sendjaya mengatakan, Pasar Kordon harus dilakukan revitalisasi atau bahkan direlokasi ke tempat yang lebih memadai. Sebab kondisi di Pasar Kordon tersebut sudah penuh atau sesak.

"Kalau saya lebih cenderung relokasi ya. Itu pun kalau memungkinkan, kalau anggarannya ada ya," kata Edwin Sendjaya pada Senin (4/3).

Ia menuturkan bahwa situasi di Pasar Kordon sudah sangat sesak dan penuh. Apabila hendak direvitalisasi

atau dibangun, pihaknya mengaku belum dapat membayangkan hal tersebut.

"Kondisinya sudah seperti itu, yang paling ideal itu relokasi, cuma kita kembali kepada masalah uang. Jadi kalau misalnya uangnya tidak ada, ya terpaksa harus revitalisasi saja, pembangunan saja," ucapnya.

Dengan revitalisasi atau relokasi, Edwin berharap masyarakat yang akan berbelanja akan lebih merasa nyaman dan aman. Terkait rekayasa lalu lintas di wilayah tersebut, masih harus berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

"Itu perlu dikoordinasikan dulu dengan pihak kepolisian, dengan Dishub. Karena mereka yang lebih kompeten untuk melakukan rekayasa lalu lintasnya," ujar dia. ● pra

Anggota DPRD DIY Minta Tak Ada Sweeping Saat Ramadhan

YOGYAKARTA (IM) - Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Suwanto mengharapkan situasi DIY tetap aman dan kondusif saat bulan Ramadhan. Eko mengimbau warga yang berpuasa dan tidak berpuasa untuk saling menghormati.

Untuk itu, Eko meminta tidak ada aksi sweeping terhadap rumah makan saat bulan puasa nanti. "Tidak boleh ada sweeping rumah makan. Yang berpuasa menghormati yang tidak puasa, yang tidak berpuasa juga menghormati yang puasa," ujar Eko, yang merupakan ketua Komisi A DPRD DIY itu di Yogyakarta, Senin (4/3).

Eko berharap masyarakat tetap menjaga situasi aman dan kondusif. Aparat kepolisian beserta Jaga Warga di lima kabupaten/kota wilayah DIY pun diharapkan dapat terus menjaga situasi dan

kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), dengan menggunakan kearifan lokal. "Ramadhan ini adalah momentum aman lahir batin," kata dia.

Pada bulan Ramadhan nanti, Eko mengatakan, selain ibadah ritual, masyarakat seyogianya dapat memupuk toleransi, serta menguatkan solidaritas dengan saling membantu sesama. "Saling tolong-menolong antara yang mampu secara ekonomi dan yang tidak mampu. Yang kecukupan dan kurang kecukupan agar saling membantu," ujar dia.

Menurut Eko, praktik toleransi dan tenggang rasa penting untuk terus dijaga di DIY. Hal ini juga disebut turut mendukung DIY sebagai tujuan wisata. "Tentu, ketika Yogyakarta ini aman, nyaman, maka wisatawan juga senang," kata dia. ● pra



IDN/ANTARA

GERAKAN TANAM CABAI SERENTAK

Anggota PKK membawa bibit cabai dalam gerakan menanam cabai serentak di Buruan Sae Bina Mandiri, Arcamanik, Bandung, Jabar, Senin (4/3). Gerakan tanam cabai yang dilakukan secara serentak se-Indonesia dalam rangka memperingati hari kesatuan gerak PKK untuk menangani inflasi komoditas cabai yang saat ini sedang naik harga.

Status Tanggap Darurat untuk Pergerakan Tanah di Rongga

BANDUNG (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menetapkan status tanggap darurat untuk kejadian bencana pergerakan tanah di Kampung Cigombong, Desa Cigedung, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Status tanggap darurat berlaku selama 14 hari ke depan.

"Jadi tanggap darurat dalam rangka mempercepat proses pengurusan para korban dari bencana khususnya tanggap darurat menyelamatkan orang dari gerakan tanah di desa," ujar Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat, Asep Sehabudin saat dikonfirmasi, Senin (4/3).

Setelah masa tanggap darurat, kata dia, pihaknya akan melakukan kegiatan pemulihan terhadap para korban.

Apabila tidak memungkinkan kembali ke tempat semula, Asep mengatakan para korban akan direlokasi.

"Relokasi masih di lokasi sekitar sana tidak jauh dari

Islamic Center, kata pak kades ada tanah desa cukup luas bisa dipakai," kata dia.

Asep mengatakan relokasi membutuhkan proses yang panjang. Oleh karena itu, pihaknya akan menyiapkan hunian sementara sebelum pembangunan rumah warga selesai.

"Relokasi butuh proses untuk membangun rumah berarti korban bencana disediakan hunian sementara sambil proses pembangunan sampai permanen," katanya.

Asep menambahkan 47 rumah mengalami kerusakan dari skala ringan hingga berat. Total 165 jiwa mengungsi akibat bencana pergerakan tanah tersebut. "Sudah rusak 47 rumah, 165 jiwa (mengungsi), satu sekolah delapan ruangan rusak," kata dia.

Ia mengatakan tim geologi akan mendatangi hari ini untuk mengecek kondisi pergerakan tanah. Mereka akan mengecek apakah pergerakan tanah akan semakin meluas atau tidak. ● pra

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



BENCANA TANAH LONGSOR DI LEBAK Warga melihat kondisi rumahnya yang rusak akibat longsoran tanah di Desa Ciharang, Lebak, Banten, Senin (4/3). BPBD Kab. Lebak mencatat sebanyak sembilan rumah mengalami kerusakan, dua di antaranya hilang dan tiga lumbung padi rusak akibat bencana tanah longsor yang disebabkan hujan deras terjadi di kawasan tersebut pada Minggu (3/3).

Kunjungi MPP Kab. Cirebon, Menteri PANRB Tegur Keras Ketua Pengadilan

Saat mendatangi meja outlet PN Kabupaten Cirebon, ternyata tidak ada satupun petugas yang berjaga. Saat itulah, Menteri PANRB menanyakan keberadaan ketua PN. Namun, ditunggu beberapa saat, yang bersangkutan sama sekali tidak muncul.

CIREBON (IM) - Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menegur keras Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Cirebon, Achmad Ukayat. Teguran dilayangkan saat Abdullah Azwar Anas meninjau perkembangan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon digedung DPMPSTP setempat, Senin (4/3).

Hal tersebut bermula, ketika Menteri PANRB berkeliling ke setiap meja outlet perizinan masing-masing SKPD termasuk perwakilan penguasaan SIM. Saat mendatangi meja outlet PN Kabupaten Cirebon, ternyata tidak ada satupun petugas yang ber-

jaga. Saat itulah, Menteri PANRB menanyakan keberadaan ketua PN. Namun, ditunggu beberapa saat, yang bersangkutan sama sekali tidak muncul.

"Ini kenapa kosong. Mana pegawainya, terus mana ketua PN-nya, coba cari," kata Abdullah Azwar Anas.

Diduga kecewa karena ketua PN tidak juga datang, Menteri PANRB memerintahkan stafnya untuk mengambil foto, outlet PN Sumber yang kosong tadi. Namun saat melanjutkan keliling ke outlet lainnya, tiba-tiba Ahmad Ukayat muncul dan langsung mendatangi Menteri Abdullah Azwar Anas. Entah apa yang dibicarakan, namun

raut kekecewaan tidak bisa disembunyikan Menteri PANRB.

"Kalau tidak ada orang, ya sudah tutup saja outletnya, terus copot tuh tulisan PN Cirebonnya. Fotonya sudah saya pegang, nanti saya kirim ke pusat," ancam Menteri PAN RB.

Usai melakukan meninjau seluruh outlet di lokasi MPP, kepada wartawan Menteri PANRB menilai, pelayanan MPP Kabupaten Cirebon sampai saat ini masih belum optimal. Ini terlihat dari tingkat kunjungan masyarakat yang masih sangat rendah. Kemungkinannya, pertama masyarakat sudah digitalisasi atau mungkin malah tidak tersosialisasi atau tidak terintegrasi pelayanannya.

"Tolong ya buat bupati Cirebon, pelayanan MPP segera dievaluasi. Wong saya tanya tadi, dalam sehari pengunjung hanya tiga sampai lima belas pengunjung. Di Kabupaten Banyuwangi itu, sehari bisa tembus lebih dari seribu pengunjung. Di sini malah sepi," ungkapnya.

Untuk itu, saat ini pi-

haknya sedang melakukan penilaian terkait masalah pelayanan MPP di Kabupaten Cirebon. Seharusnya, masyarakat yang datang ke MPP untuk mengurus izin apapun, dalam sehari harusnya bisa selesai. Sementara pemerintah memberikan warning, bagaimana caranya saat ini birokrasi itu tidak berbelit-belit.

"Masalah ini juga tolong dievaluasi lagi oleh pak bupati. Apakah birokrasi di sini masih berbelit. Pokoknya yang mengurus izin di sini tidak ada urusan lain lagi. Mereka datang dan selesai semua urusan," pintanya.

Hal lain yang menjadi sorotan Menteri PANRB adalah, masalah Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Cirebon yang benar-benar belum maksimal. Justru harusnya, Bupati segera memerintahkan semua ASN di Kabupaten Cirebon, memakai IKD. Pasalnya, di zaman digitalisasi saat ini, IKD sangat penting untuk kelancaran semua data.

"Presiden sedang mendorong digitalisasi birokrasi. Saat ini kita melarang aplikasi baru, karena tiga bulan ke depan presiden memerintahkan bahwa seluruh Kementerian dan lembaga, seluruh aplikasi harus menjadi satu portal layanan. Jadi cukup masuk dalam satu pintu saja," ucapnya.

Sementara itu, ditanya masalah IKD, Kadisduk Capil Kabupaten Cirebon, Iman Supriadi mengaku kesulitan melakukan sosialisasi IKD kepada masyarakat kabupaten Cirebon. Alasannya, karena masyarakat di Kabupaten Cirebon masih banyak warga miskin. Namun untuk ASN di Pemkab Cirebon sendiri, dirinya menjamin, 100 persen sudah memiliki IKD.

"Kita kesulitan melakukan sosialisasi ke masyarakat bawah. Tapi atas arahan Menteri PANRB, akan berupaya semaksimal mungkin. Jangkakan IKD, fisik KTP saja kita masih banyak yang kurang," tukasnya. ● pra

Penertiban PKL Pasar Kebon Kembang Ricuh

BOGOR (IM) - Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Kebon Kembang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, diwarnai keriuhan. Dari pantauan di lokasi, Kasat Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach sempat adu mulut dengan pedagang. PKL menolak pembongkaran lapak yang berada di jalur pedestrian depan blok C-D, Pasar Kebon Kembang.

Agustian mengatakan, penertiban dilakukan agar mengembalikan fungsi jalur pedestrian di kawasan tersebut. Selama ini, Satpol PP sudah memberikan imbauan kepada para PKL.

Namun, tetap saja masih banyak PKL yang menggunakan jalur pedestrian sekitar Pasar Kebon Kembang untuk

menggelar lapak dagangan.

"Sudah komunikasi selama ini. Sudah kesepemahaman," ucap Agustian.

Satpol PP Kota Bogor berencana menertibkan 125 lapak PKL. Untuk menghindari bentrokan, petugas Satpol PP mundur dan memberikan keleluasan agar pedagang menertibkan sendiri barang dagangannya.

PKL diberikan waktu hingga Senin sore. "Sore kita akan kontrol ke sini, kalau mereka masih berdagang di sini, ya kita akan mengambil tindakan yang lebih tegas lagi," tutur dia.

Rencananya, PKL yang berjualan di sekitar Pasar Kebon Kembang bakal direlokasi ke Jalan Nyi Raja Permas. ● jai

Jalan Batuhulung Balumbang Jaya Longsor Lagi, Akses Warga Terputus

BOGOR (IM) - Longsor kembali terjadi di Jalan Batuhulung, Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Minggu (3/3) pukul 05.00 WIB. Ketua RT 05, Kelurahan Balumbang Jaya, Uca, mengatakan, longsor terjadi di titik longsor sebelumnya yang tengah dibenahi oleh Pemerintah Kota Bogor.

"Longsornya kejadiannya subuh, ini lokasinya di titik yang lagi dibenerin bekas dulu longsor," ucap Uca, Senin (4/3).

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, longsor membuat akses warga setempat terputus. Kendaraan roda empat maupun roda dua tidak dapat melintas. Warga yang hendak melintas di jalan tersebut terpaksa memutar jalan dengan jarak tempuh yang lebih jauh. "Ada jalan pintas, nanti bisa lewat kelurahan sebelah," ujar Uca.

Longsor juga membuat aliran pipa air milik PDAM Tirta Pakuan terputus. Satu kelurahan Balumbang Jaya tak teraliri air.

Perbaikan pipa yang putus saat ini sedang dalam tahap pengerjaan.

"Untuk sementara, setiap RW di Kelurahan Balumbang Jaya sudah didistribusikan air bersih melalui tangki air PDAM sendiri. Pendistribusian air ini akan berjalan sampai tahap pengerjaan pipa selesai," kata Uca.

Diketahui, Jalan Balumbang Jaya sempat mengalami longsor dan terbengkalai selama beberapa tahun. Longsor akhirnya mendapat perhatian dan ditangani oleh Dinas PUPR melalui pembangunan tembok penahan tanah (TPT).

Area longsor tersebut akan dibangun TPT dengan panjang 30 meter dan tinggi 16 meter. ● jai



IDN/ANTARA

BURSA KERJA DI BEKASI

Ribuan pencari kerja antre untuk memasuki area bursa kerja di Pusat Perbelanjaan di Medan Satria, Bekasi, Jabar, Senin (4/3). Kegiatan yang diadakan selama satu hari itu meghadirkan 30 perusahaan sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja formal.